

BAB II

KAJIAN TEORI DAN DAFTAR PUSTAKA

2.1 Pengertian Auditing

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan (Mulyadi, 2014). Sementara itu menurut (Arista, Kuntadi, & Pramukty, 2023) audit adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan bukti sebagai informasi dalam sebuah laporan keuangan dengan melacak dan mengungkap informasi secara nyata.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa auditing adalah pemeriksaan untuk menguji kesesuaian objek pemeriksaan dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Auditing dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menguji bukti pembukuan dan pendukung objek pengauditan.

2.2 Manfaat Auditing

1. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

a. Mengatasi konflik kepentingan

Dalam menyajikan laporan keuangan manajemen cenderung tidak objektif, sementara pengguna laporan keuangan menuntut objektivitas dalam penyajian laporan keuangan;

b. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

Melalui proses pengauditan, keandalan laporan keuangan lebih terjamin, dan oleh karenanya keputusan juga menjadi lebih berkualitas;

c. Mengatasi *problem* kompleksitas proses akuntansi

Pengauditan adalah langkah yang paling efisien untuk menjamin keandalan laporan keuangan, mengingat kompleks dan rumitnya proses akuntansi;

d. Mengatasi *problem* jarak antara penyaji dan pengguna laporan keuangan

Pengujian laporan keuangan lebih efisien dan efektif dilakukan melalui proses pengauditan yang dijalankan oleh KAP, mengingat *problem* jarak antara penyaji dan pengguna laporan keuangan serta *problem* legal dan teknis pengujian laporan keuangan.

2. Bagi Pihak Manajemen

a. Meningkatkan peluang akses ke pasar modal

Pengauditan laporan keuangan menjadi salah satu syarat untuk terdaftar di pasar modal;

b. Menurunkan biaya modal

Biaya modal bisa lebih murah jika perusahaan terkendali dengan baik dan juga prospektif;

c. Meningkatkan efisiensi operasi dan juga mencegah kecurangan (*fraud*)

Dengan tercegahnya kecurangan maka kegiatan operasional akan berjalan dengan lebih hemat dan murah;

d. Meningkatkan kualitas pengendalian dan juga kualitas kegiatan operasional.

Pihak manajemen akan lebih mudah melakukan pengendalian terhadap kegiatan operasional dengan lebih tertata, sehingga kualitasnya akan tetap terjaga.

2.3 Asersi dalam Auditing

Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak dengan tujuan digunakan oleh pihak ketiga. Asersi dalam audit terdiri dari berbagai macam bagian, setiap badan dan Lembaga memiliki ketetapan dan standar masing-masing yang sedikit berbeda.

Institut Akuntan Publik Indonesia atau biasa disebut IAPI dan dalam bahasa asing disebut *Indonesian Institute of Certified Public Accountants* (IICPA) adalah suatu ikatan akuntan publik dan salah satu badan standar akuntansi yang ada di negara Indonesia. IAPI memiliki wewenang dalam menyusun dan menetapkan Standar Profesional dan Etika Akuntan Publik, menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan dan peninjauan mutu akuntan publik, serta melaksanakan ujian profesi akuntan publik.

Institut Akuntan Publik Indonesia dalam "SA 315" paragraf A 111 mengklasifikasikan asersi sebagai berikut.

1. Asersi untuk Transaksi

a. Keterjadian (*occurrence*)

Transaksi dan peristiwa yang telah terbukukan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas;

b. Kelengkapan (*completeness*)

Seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat;

c. Keakurasian (*accuracy*)

Jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang telah dibukukan telah dicatat dengan tepat;

d. Pisah Batas (*cut-off*)

Transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat;

e. Klasifikasi (*classification*)

Transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat.

2. Asersi untuk Saldo Akun

- a. **Eksistensi (*existence*)**
Aset, liabilitas dan ekuitas ada;
- b. **Hak dan Kewajiban (*rights and obligations*)**
Entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas;
- c. **Kelengkapan (*completeness*)**
Seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya bab 5 - tujuan audit dan asersi 8 terbukukan telah dicatat;
- d. **Penilaian dan alokasi (*valuation and allocation*)**
Aset, liabilitas, dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat.

3. Asersi Penyajian dan Pengungkapan

- a. **Keterjadian serta hak dan kewajiban (*occurrence and rights-obligations*)**
Peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas;
- b. **Kelengkapan (*completeness*)**
Seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan;
- c. **Klasifikasi dan keterpahaman (*classification and understandability*)**
Informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan dengan jelas;
- d. **Keakurasian dan penilaian (*accuracy and valuation*)**
Informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. ((IAPI), 2021)

2.4 Pengertian Piutang Dagang

Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat tagihan adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, dimana tagihan tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal, akan tetapi karena adanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan (Rada & Maulana, 2019). Lain halnya dengan pernyataan Roosdianto, menurut (Roosdianto, 2014) "Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain yang timbul akibat penjualan barang dan atau jasa secara kredit dalam rangka kegiatan normal perusahaan", sementara itu menurut (Purwati, 2015) "Tuntutan atau klaim antara pihak yang memperoleh pembayaran dengan pihak yang akan membayar kewajibannya, atau dapat disebutkan sebagai tuntutan kreditur terhadap debitur yang pembayarannya biasanya dilakukan dengan uang."

Beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa piutang dagang merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan bagi pelanggan yang belum memiliki kapasitas dalam periode tersebut untuk melakukan pembayaran, pembayaran atas barang/jasa tersebut akan dibayarkan pelanggan sesuai dengan janji/termin yang sudah ditetapkan.

2.5 Manfaat Piutang Dagang

1. Bagi Pihak Perusahaan

- a. Meningkatkan penjualan;
- b. Memutar persediaan;
- c. Memperluas sektor bisnis;
- d. Melakukan uji coba terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) terkait piutang;
- e. Menciptakan lingkungan bisnis yang nyaman bagi sesama pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan.

2. **Bagi Pihak Pelanggan**
 - a. Meningkatkan pembelian;
 - b. Memutar persediaan;
 - c. Mendapatkan waktu yang lebih panjang dalam melakukan pembayaran;
 - d. Mendapat potongan harga/diskon.

2.6 Pengakuan Piutang Dagang

Piutang dagang diakui oleh perusahaan pada saat telah diserahkan barang maupun pelayanan jasa kepada pelanggan. Pengakuan piutang dagang lebih lanjut diatur dalam 2 (dua) cara terkait pengakuannya, menggunakan *FOB (Free On Board)*, *FOB Shipping Point* dan *FOB Destination*. Berikut pengertian singkat mengenai 2 jenis/skema *FOB (Free On Board)*:

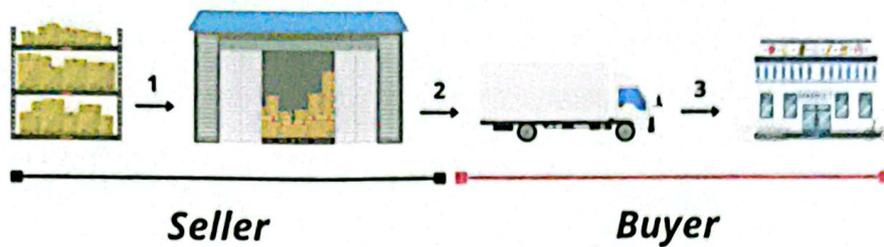
1. *FOB Shipping Point*

FOB Shipping Point merupakan jenis pengiriman yang barangnya akan menjadi tanggung jawab penjual hanya sampai pada tempat pengiriman barang (jasa angkut/kurir).

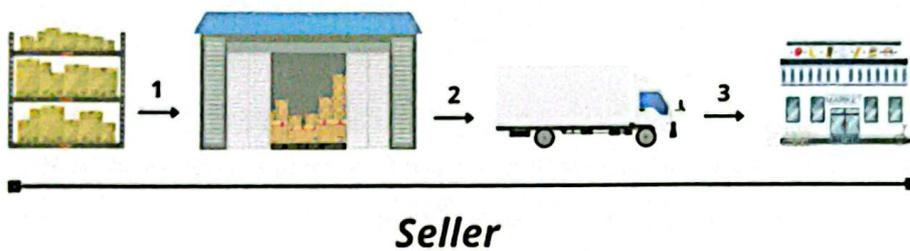
2. *FOB Destination*

FOB Destination merupakan jenis pengiriman yang barangnya akan menjadi tanggung jawab penjual secara utuh sampai barang tersebut diterima oleh pembeli, baik diterima di gudang atau di lokasi tujuan yang lain.

FOB Shipping Point

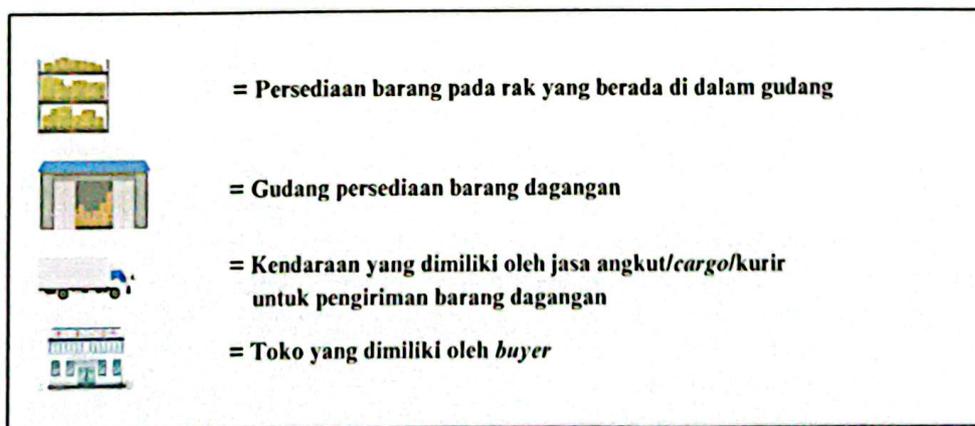


FOB Destination



Gambar 1. Siklus FOB *Shipping Point* dan *Destination*

Berikut penjelasan mengenai gambar dan angka pada kedua ilustrasi di atas:



Gambar 2. Keterangan terkait Simbol pada Siklus

- 1 → *Seller* memeriksa serta memastikan persediaan barang/barang dagangan yang ada di dalam gudang untuk memberi informasi bahwa permintaan *buyer* dapat tercukupi.

- 2 → *Seller* mengangkut dan menyerahkan barang dagangan tersebut kepada jasa angkut barang/*cargo*/kurir.

- 3 → Jasa angkut barang/*cargo*/kurir mengangkut barang dagangan yang telah diserahkan *seller* menuju lokasi *buyer* yang berwujud toko.

Penjelasan di atas memberikan informasi bahwa piutang dagang dengan jenis *FOB Shipping Point* diakui pada saat nomor ke-2 atau setelah barang dagangan keluar dari Gudang persediaan *seller*, sedangkan jenis *FOB Destination* diakui pada saat nomor ke-3 atau setelah barang dagangan tersebut telah diterima *buyer*.

2.7 Transaksi dan Akun terkait Piutang Dagang

Berikut adalah transaksi dan akun yang berkaitan dalam bentuk metode fisik/periodik:

Nama Transaksi	Nama Akun	
	Debit	Kredit
Penjualan Kredit	Piutang Dagang	Penjualan
Pelunasan Piutang	Kas	Piutang Dagang
Potongan Tunai	Potongan Tunai	Piutang Dagang
Retur Penjualan	Retur Penjualan	Piutang Dagang
Kerugian Piutang	Kerugian Piutang	Cadangan Kerugian Piutang (CKP)
Penghapusan Piutang	Cadangan Kerugian Piutang (CKP)	Piutang Dagang

Gambar 3. Transaksi dan Akun terkait Piutang Dagang

2.8 Pengertian Audit Piutang Dagang

Audit Piutang Dagang adalah suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kesesuaian piutang dagang dengan metode yang sesuai serta standar atau ketentuan yang berlaku. Audit piutang dagang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menguji bukti pembukuan dan pendukung piutang dagang.

Menurut (Arens, Elder, Beasley, & Amir, 2016) dalam mengaudit piutang, auditor harus memperhatikan delapan tujuan audit terkait saldo piutang, antara lain:

1. Akun piutang dalam neraca sesuai dengan nilai pada master file yang terkait dan totalnya telah terjumlah dengan benar sesuai dengan buku besar;
2. Akun piutang yang tercatat benar-benar ada;
3. Akun piutang yang ada telah tercatat;

4. Akun piutang tercatat dengan akurat;
5. Akun piutang telah diklasifikasikan dengan benar;
6. *Cut-off* untuk piutang benar;
7. Akun piutang tercatat pada nilai yang terealisasi;
8. Klien memiliki hak atas piutang.

2.9 Dokumen yang Dibutuhkan

Menurut (Agoes, 2019) terdapat 3 (tiga) jenis dokumen yang dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan, yakni:

1. Berkas Permanen (*Permanent File*)

Berkas Permanen (*Permanent File*) adalah dokumen yang dikumpulkan pada saat perikatan audit pertama kali dimulai dan ditelaah serta disimpan untuk tahun audit berikutnya, dan terdiri dari:

- a. Akta pendirian serta akta perubahannya;
- b. Informasi penting entitas, meliputi riwayat perusahaan, lokasi, dan daftar afiliasi beserta nama eksekutif perusahaan;
- c. Dokumen perijinan, meliputi (SIUP, TDP, IMB NPWP, dll);
- d. System akuntansi manual, meliputi struktur organisasi, SOP, job description, kebijakan dan prosedur akuntansi, serta sistem produksi;
- e. Surat-surat keputusan mengenai fasilitas perpajakan
- f. Kontrak perjanjian, meliputi perjanjian kredit bank, perjanjian sewa, kontrak dengan pihak ketiga lainnya, dan kontrak penjualan.

2. Dokumen tahun berjalan (*Current File*)

Dokumen kertas kerja yang berisi informasi yang diperoleh auditor sehubungan dengan data tahun berjalan yang biasa disebut sebagai *current file* atau dokumen tahun berjalan. *Current file* terdiri dari:

- a. Informasi umum;
- b. Kertas kerja neraca saldo, termasuk kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi;
- c. *General ledger*;
- d. Jurnal penyesuaian dan reklasifikasi;
- e. Program audit;
- f. *Top schedules/lead schedules*;
- g. *Supporting schedules*;
- h. Catatan pemeriksaan (*audit notes*).

3. Berkas Korespondensi (*Corespondence file*)

Berkas ini berisi dokumen kertas kerja yang berisi pencocokan atau surat-menyurat dengan pihak ketiga selama proses audit. seperti konfirmasi utang, konfirmasi piutang, konfirmasi bank dan sebagainya

2.10 Pengujian Substantif

1. Prosedur Pendahuluan

Prosedur ini adalah prosedur pertama dan paling awal dari setiap proses pengujian substantif suatu akun, prosedur ini digunakan untuk memastikan kesiapan data piutang dagang yang akan diuji. Langkah-langkah prosedur pendahuluan, yaitu:

- a. Mencocokkan saldo awal akun piutang dagang ke saldo per audit tahun sebelumnya;
- b. Memeriksa dan mencatat kemungkinan adanya transaksi yang tidak lazim, baik dari segi jumlah maupun sumbernya;
- c. Memeriksa kesesuaian antar data pembukuan;

- d. Memeriksa kebenaran penjumlahan dan perhitungan-perhitungan penting yang lain.

2. Prosedur Pengujian Analitis

Menurut (KLS, 2023), "Prosedur pengujian analitis adalah salah satu tahap penting dalam setiap pekerjaan audit keuangan untuk mengidentifikasi ada tidaknya anomali sehingga dapat menentukan area kegiatan dan dokumen yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam bagi pengujian substantif".

Prosedur ini dilakukan dengan cara melakukan berbagai analisis rasio, yaitu:

- a. Rasio piutang dagang dengan penjualan;
- b. Rasio perputaran piutang dagang;
- c. Rasio piutang dagang terhadap aktiva lancar;
- d. Membandingkan rasio yang ada dengan rasio yang diharapkan.

3. Prosedur Pengujian Detail Transaksi

Prosedur ini merupakan tindak lanjut dari prosedur sebelumnya, dengan tujuan untuk menguji validitas transaksi dan pembukuan atas sampel transaksi yang dipilih. Prosedur ini mencakup:

- a. Vouching sampel debit piutang dagang ke faktur penjualan dan dokumen pendukungnya, atau lakukan tracing;
- b. Vouching sampel kredit piutang dagang ke bukti pelunasan piutang dagang dan dokumen pendukungnya atau lakukan tracing;
- c. Menguji ketepatan pisah batas (*cut-off*) transaksi penjualan dan pelunasan piutang dagang dengan cara, yaitu:
 - 1) Memeriksa sampel transaksi penjualan beberapa hari sebelum dan sesudah tanggal neraca untuk menguji

ketepatan periode pencatatannya, seperti syarat (*FOB Shipping Point/Destination*), termin, dan perjanjian lainnya;

- 2) Memeriksa sampel bukti pelunasan piutang dagang dan sampel pembukuan pelunasan piutang dagang, untuk menguji ketepatan periode pembukuannya.

4. Prosedur Pengujian Detail Saldo Akun

Pengujian detail saldo akun bertujuan untuk memastikan kewajaran saldo piutang dagang, karena pengujian selalu dilakukan berdasarkan sampel transaksi. Pengujian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Ambil sampel piutang dagang kepada *customer/buyer* utama perusahaan;
- b. Kirim konfirmasi piutang dagang dan investigasi perbedaan yang terjadi.

5. Prosedur Review Penyajian dan Pengungkapan

Ikatan Akuntansi Indonesia melalui "PSAK 201" menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Oleh karena itu prosedur ini merupakan prosedur akhir dari pengujian substantif yang sangat penting dan diperlukan atas akun dalam laporan keuangan, khususnya akun piutang dagang ((IAI), 2024).

Pengungkapan disebut juga dengan *disclosure* mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut (Sefty & Farihah, 2016). Prosedur

penyajian dan pengungkapan ini dapat dilakukan dengan cara. Pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Memeriksa ketetapan klasifikasi piutang dagang;
- b. Memeriksa kecukupan kelengkapan.